

Strategi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Dalam Upaya Menjadikan Organisasi Yang Lebih Efektif

Rahmad Ferly Hardinata¹

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ rahmadhardinata@gmail.com

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah organisasi yang memegang peran penting dalam pemerintahan desa (Hartono, 2023). Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan, peningkatan kapasitas anggota BPD sangat penting untuk menjadikan organisasi ini lebih efektif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang penting dalam mengelola urusan desa. Namun, untuk menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan strategi peningkatan kapasitas anggota BPD. Pengabdian ini membahas berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD dalam upaya menjadikan organisasi yang lebih efektif. Berfokus pada peningkatan kapasitas anggota BPD melalui program pelatihan, pengabdian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan nyata dalam bentuk teori ataupun praktik. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas anggota BPD dan menjadikan organisasi yang lebih efektif.

Kata Kunci: *BPD, Strategi, Peningkatan Kapasitas, Organisasi Efektif, Pengabdian*

Sitasi: Hardinata, R. F. (2024). Strategi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Dalam Upaya Menjadikan Organisasi Yang Lebih Efektif. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1), 55-57.

Artikel Info

Received: 14 Januari 2024

Accepted: 17 Januari 2024

Pendahuluan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa, memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu tugasnya adalah merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kuswandi et al., 2023). Keberadaan BPD merefleksikan bahwa masyarakat desa bukan hanya sekedar subjek pembangunan tetapi sekaligus objek pembangunan. Secara lembaga, kedudukan BPD saat ini telah berubah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa (Hasibuan et al., 2022). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (Akbar, 2017). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan (Zitri et al., 2022).

Pembangunan desa merupakan sebuah konsep perencanaan kegiatan yang diawali dari tingkat yang paling bawah dengan tujuan mampu menyerap aspirasi masyarakat (Dwinarko et al., 2021). BPD adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Meningkatkan kapasitas anggota Badan Perwakilan Desa merupakan langkah penting dalam menjadikan organisasi tersebut lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini. Salah satunya adalah dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab anggota BPD. Dengan adanya pelatihan, anggota BPD dapat lebih memahami peran dan fungsinya sehingga mampu menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Selain itu, memperkuat jaringan komunikasi dan kerjasama antar anggota BPD juga menjadi strategi penting. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi di antara anggota, organisasi akan menjadi lebih solid dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Upaya untuk membangun hubungan yang baik antar anggota juga dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam menjalankan tugas mereka.

Namun, seringkali kapasitas anggota BPD belum optimal dalam menjalankan perannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi, dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, sedangkan pendampingan bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diterapkan dalam praktik. Diharapkan melalui pengabdian ini, kapasitas anggota BPD dapat ditingkatkan sehingga mereka dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan di tingkat desa, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui pelatihan dan pendampingan anggota BPD di Desa Plaosan. Kegiatan pengabdian ini terpusat kepada BPD Desa Plaosan Kabupaten Sidoarjo, dengan berlokasi di Balai Desa Plaosan. Dalam rangka memberikan pemahaman dan pelatihan yang mendalam tentang teori dan praktik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dan menjadikannya organisasi yang lebih efektif. Pelatihan ini dilakukan selama 2 Minggu, dan dilaksanakan satu minggu sekali pada hari minggu.

Hasil dan Pembahasan

Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Strategi peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan hal yang penting dan strategis dalam memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi, sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Peningkatan kapasitas anggota BPD dalam hal pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara yang pertama yaitu Pelatihan dan Lokakarya, sesi pelatihan dan lokakarya rutin dapat diselenggarakan untuk mendidik anggota BPD tentang berbagai aspek peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini dapat mencakup pelatihan tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan, resolusi konflik, dan topik relevan lainnya. Kedua yaitu pemaparan terhadap Praktik-Praktik Terbaik. Para anggota BPD dapat mengenal praktik-praktik terbaik dari lembaga-lembaga musyawarah desa yang sukses. Hal ini dapat dilakukan melalui program pertukaran, kunjungan, atau platform online di mana mereka dapat belajar dan berbagi pengalaman. Yang ketiga adalah Program Pendampingan, anggota yang berpengalaman atau pakar eksternal dapat membimbing anggota BPD yang kurang berpengalaman. Hal ini dapat memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan praktis yang tidak mudah diperoleh melalui pelatihan formal. Selanjutnya Pendidikan Berkelanjutan, mendorong anggota BPD untuk melanjutkan studi di bidang yang relevan. Hal ini dapat difasilitasi melalui beasiswa atau bentuk dukungan keuangan lainnya. Berikutnya yang terakhir adalah Penggunaan Teknologi, memperkenalkan dan melatih anggota BPD mengenai penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak untuk manajemen proyek, komunikasi, dan analisis data.

Selain itu, pengembangan kapasitas anggota BPD juga dapat dilakukan melalui pertukaran pengalaman antar-BPD di berbagai desa, seminar, lokakarya, dan program pelatihan lainnya. Peningkatan kapasitas anggota BPD juga dapat melibatkan pemberian akses terhadap sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Dengan menerapkan cara-cara ini, diharapkan anggota BPD dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan desa.

Pendampingan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD yang kami lakukan telah berjalan dengan lancar dan mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota BPD. Pengabdian yang dijelaskan dalam berbagai program pelatihan dan pendampingan dinilai sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan manajemen pemerintahannya. Kegiatan ini tidak hanya sekedar memberikan panduan materi, tetapi juga dengan mendampingi langsung perangkat desa dan anggota BPD dengan undang-undang yang berlaku. Melalui kegiatan pendampingan ini, anggota BPD di desa Plaosan tidak hanya memahami strategi tetapi juga melaksanakan strategi dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya kegiatan pengabdian yang telah dilakukan ini mampu memberikan nilai yang positif bagi perkembangan pemerintah desa, meski belum semaksimal mungkin. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa strategi peningkatan kapasitas anggota BPD yang efektif termasuk pelatihan dan pendampingan, pemaparan terhadap praktik-praktik terbaik, pendidikan berkelanjutan, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan keterlibatan anggota. Dengan melakukan pelatihan dan lokakarya, kami berhasil mendidik anggota BPD menjadi lebih faham tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan, resolusi konflik, dan topik relevan lainnya.

Namun, perlu diingat bahwa peningkatan kapasitas ini bukanlah proses yang instan. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang konsisten dari semua pihak yang terlibat, termasuk anggota BPD sendiri, pemerintah desa, dan instansi terkait yang menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas anggota BPD adalah langkah penting yang dapat membantu memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa dan mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan kebutuhan penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi tata kelola desa. Dengan menerapkan strategi ini, BPD dapat meningkatkan kapasitas anggotanya dan pada gilirannya, menciptakan organisasi yang lebih efektif dalam mengelola kegiatan di tingkat desa. Upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD merupakan langkah krusial dalam memperkuat peran BPD sebagai lembaga representatif masyarakat dalam pembangunan desa. Strategi tersebut yaitu pelatihan dan lokakarya, pemaparan praktik-praktik, program pendampingan, pendidikan berkelanjutan, dan penggunaan teknologi.

Referensi

- Akbar, D. S. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Penelitian Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Ilmiah EDUKASI*, 5(7), 109-119.
- Dwinarko, D., Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 217–225. <https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.314>
- Hasibuan, M. R., Harahap, R. H., & Humaizi, H. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mananti Sosa Jae. *PERSPEKTIF*, 11(2), 674–691. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6084>
- Kuswandi, A., Hartono, R., & Nuraini, S. (2023). Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melalui Pendekatan Workshop di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. *Abdimas Galuh*, 5(2), 1600-1613.

doi:<http://dx.doi.org/10.25157/ag.v5i2.11810>

Zitri, I., Rifaid., & Umami, R. (2022). Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot Dalam Penyusunan PERDes PEMBENTUKAN BUMDes. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(3), 726–738. <https://doi.org/10.31764/jces.v3i1.9326>